

BAB III

ANALISIS KONSTRUKTIVISME

3.1. Analisis Pengaruh Struktur terhadap Langkah yang Dilakukan Agen

Dalam teori Konstruktivisme, disebutkan bahwa struktur dapat memberikan pengaruh kepada tingkah laku atau langkah yang diambil oleh suatu aktor, baik itu aktor negara ataupun individu (Burchill, et al., 2005). Pada bagian ini, akan dianalisis peranan struktur, yaitu struktur normatif dan gagasan, mempengaruhi kebijakan serta langkah yang diambil aktor pada kasus yang diambil oleh penelitian ini. Dengan kata lain, akan dianalisis bagaimana gagasan politik luar negeri Indonesia dapat memberikan penjelasan secara konstruktivis terhadap langkah-langkah yang diambil Yudhoyono dalam menghadapi kebijakan *pivot to Asia*. Bagian ini akan terbagi pada dua bentuk analisis, yaitu analisis mengenai bagaimana struktur gagasan dan norma politik luar negeri Indonesia mempengaruhi Yudhoyono dalam menciptakan prinsip politik luar negerinya, lalu akan dibahas bagaimana prinsip politik luar negeri tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan Yudhoyono terhadap kebijakan *pivot to Asia* yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

3.1.1. Analisis Pengaruh Norma dan Gagasan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Prinsip Politik Luar Negeri Yudhoyono

Dalam politik luar negeri Indonesia, terdapat tiga dasar-dasar, yaitu: politik luar negeri bebas dan aktif, UUD tahun 1945, serta UU no. 37 tahun 1999. Prinsip bebas dan aktif dikemukakan oleh Sjahrir dan Hatta, dengan maksud agar Indonesia tidak mendapatkan paksaan dalam melaksanakan politik luar negerinya. Selain menolak dipaksa, juga terdapat harapan agar Indonesia tidak terpaku pada suatu sistem

internasional, termasuk sistem internasional yang tidak sesuai dengan tujuan dari Indonesia (Haryanto, 2014). Tujuan dari Indonesia sendiri dapat dilihat dari Pembukaan UUD tahun 1945, yang disebutkan bahwa Indonesia menolak penjajahan serta bentuk penjajahan harus dihilangkan dari dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki tujuan untuk melaksanakan ketertiban di dunia, dengan dasar-dasar kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan (DPR RI, n.d.). Tujuan yang lain juga dipaparkan dalam UU no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, seperti politik luar negeri Indonesia dilakukan untuk menciptakan ketahanan nasional, sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Adapun penjelasan dari UUD tahun 1945 dijabarkan pada UU no. 37 tahun 1999, dengan menyebutkan bahwa Indonesia harus memberikan partisipasi dalam bentuk pemikiran ataupun langkah aktif dalam penyelesaian suatu konflik, sengketa, atau permasalahan di politik internasional. Tujuan dari hal ini adalah agar tercipta ketertiban dunia, sebagaimana yang disebutkan di Pembukaan UUD tahun 1945 (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Tata cara yang digunakan oleh Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri juga disebutkan oleh ketiga dasar tersebut. Pertama, penolakan untuk dipaksa (Haryanto, 2014, pp. 22-3), yang membuat Indonesia tidak terikat dengan suatu sistem internasional atau aktor internasional, tanpa sangkaan tertentu sebelum mendapat pengertian mengenai suatu keadaan yang sebenarnya. Kedua, politik luar negeri bebas dan aktif bukan merupakan bentuk kenetralan Indonesia terhadap

suatu isu internasional, melainkan gagasan yang digunakan agar Indonesia dapat secara bebas menentukan sikap serta kebijaksanaan terhadap suatu permasalahan internasional (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Pada masa pemerintahan Yudhoyono sendiri, terdapat suatu bentuk prinsip politik luar negeri, yang disebut sebagai prinsip *a million friends, zero enemy*. Prinsip ini berdasar pada Doktrin Natalegawa, yang menjelaskan bahwa kondisi politik internasional di masa pemerintahan Yudhoyono berada pada masa yang baik untuk negara-negara dengan kekuatan baru, sehingga negara-negara tersebut semakin tidak bergantung dengan negara berkekuatan dominan (Picone & Yusman, 2014) (Mendiolaza & Hardjakusumah, 2013).

Apabila dianalisis dengan teori Konstruktivisme, khususnya dalam pemikiran bahwa struktur mempengaruhi agen, dengan asumsi bahwa struktur merupakan gagasan dan norma dari politik luar negeri Indonesia, serta agen merupakan individu Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia, dapat dilihat bahwa dasar politik luar negeri Indonesia mempengaruhi bagaimana Yudhoyono menerapkan prinsipnya dalam berpolitik luar negeri.

Pertama, prinsip yang dikemukakan Yudhoyono merupakan sebuah luaran dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Penerapan dari prinsip tersebut dapat membuat Indonesia bebas untuk menentukan arah

dan pergerakan, serta langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Hal ini disebabkan oleh, pada prinsip politik luar negeri yang digunakan oleh Yudhoyono, Indonesia memilih untuk tidak memiliki musuh, serta memiliki sejuta teman, yang merupakan metafora dari keinginan Indonesia untuk dapat bergerak secara aktif dan bebas terhadap isu-isu internasional. Dengan tidak memiliki musuh juga, Indonesia dapat berkontribusi secara luwes, seperti yang disebutkan di UU no. 37 tahun 1999, terhadap isu-isu serta permasalahan-permasalahan internasional. Lalu, dengan kebebasan karena tidak memiliki musuh tersebut, Indonesia dapat memilih untuk tidak memihak pada pihak manapun, dengan artian pada suatu sistem atau aktor internasional tertentu.

Kedua, seperti yang disebutkan pada poin pertama, bahwa Indonesia dapat memilih untuk tidak memihak pada pihak manapun, juga kemudian berpengaruh terhadap Doktrin Natalegawa. Hal ini disebabkan oleh adanya asumsi pada doktrin tersebut, yang menyebutkan bahwa terdapat kebangkitan India dan Tiongkok dalam politik internasional, tetapi asumsi oleh doktrin tersebut menyebutkan bahwa hal tersebut tidak mengancam bagi Indonesia. Doktrin tersebut juga beranggapan bahwa terdapat urgensi untuk dibentuknya suatu kerja sama yang bersifat jangka panjang, sehingga kondisi permusuhan dapat dicegah, khususnya di kawasan Samudra Hindia (Mendiolaza & Hardjakusumah, 2013).

Kembali, hal ini merupakan sebuah pengaruh langsung dari dasar politik luar negeri Indonesia. Dalam doktrin tersebut, Indonesia berusaha untuk berperan secara aktif dengan berkeinginan untuk membentuk kerja sama jangka panjang guna mencegah permusuhan. Keinginan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia ingin berperan secara aktif dalam perpolitikan internasional.

3.1.2. Analisis Pengaruh Prinsip Politik Luar Negeri Yudhoyono dalam Pengambilan Keputusan terhadap Kebijakan *Pivot to Asia*

Prinsip politik luar negeri yang digunakan oleh Yudhoyono dihasilkan dari gagasan serta norma yang terdapat dari dasar-dasar politik luar negeri Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan pada analisis di atas. Terdapat beberapa poin yang dihasilkan dari analisis tersebut. Pertama, prinsip *a million friends, zero enemy* berusaha membuat Indonesia berada di posisi yang dapat secara leluasa memainkan peran pada isu-isu serta permasalahan internasional.

Kedua, prinsip tersebut juga membuat Indonesia berusaha untuk membentuk identitas Indonesia yang tidak berpihak secara apriori terhadap suatu sistem atau aktor tertentu, seperti yang dijelaskan pada dasar politik luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia tidak memihak pada negara tertentu, seperti India, Tiongkok, atau Amerika Serikat. Ketiga, dengan sejuta teman dan tidak memiliki musuh, Indonesia berusaha memainkan peran agar tercipta kondisi yang kondusif, dengan berupaya untuk mencegah permusuhan guna

menjamin ketiadaan hambatan negara-negara *emerging power*, atau dalam hal ini agar Indonesia dapat terus berkembang.

Penerapan prinsip yang digunakan pada masa Yudhoyono tersebut juga berpengaruh terhadap bagaimana serta mengapa Indonesia merespon kebijakan *pivot to Asia* yang dilaksanakan Amerika Serikat pada masa Obama. Apabila melihat rekam jejak hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, terlihat bahwa sebelum masa pemerintahan Yudhoyono, hubungan antara kedua negara tersebut berada dalam kondisi yang beberapa saat baik, dan beberapa saat buruk. Hal ini dapat terlihat dari masa pemerintahan Sukarno sampai Megawati, dengan berbagai isu-isu yang membuat hubungan kedua negara berada dalam kondisi yang berbeda-beda, yang juga didominasi oleh hubungan yang buruk.

Hubungan yang buruk antar kedua negara banyaknya berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, ketika Indonesia sudah memasuki masa reformasi, masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap Amerika Serikat, lantaran pada saat itu Amerika Serikat menyerang Irak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia menanggapi bahwa penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak merupakan serangan terhadap Islam, sehingga pada saat itu langkah Amerika Serikat yang membuat hubungan antara kedua negara memburuk (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2010, pp. 395-398).

Pada saat Yudhoyono mulai menjadi Presiden Indonesia, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia mulai membaik. Bantuan-bantuan, baik itu yang sifatnya sipil dan militer, mulai dilakukan terhadap Indonesia. Ketika Obama memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat, hubungan antara kedua negara juga semakin membaik. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *pivot to Asia*, yang salah satunya mengarah terhadap Indonesia.

Kebijakan ini kemudian dilembagakan melalui sebuah kesepakatan *US-Indonesia Comprehensive Partnership*, sebuah bentuk kerja sama yang didasarkan dari harapan terjadinya perkembangan pada beberapa sektor, seperti keamanan, pendidikan, investasi dan perdagangan, kesehatan, energi, serta isu internasional lainnya (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2010, pp. 395-398). Selain dari adanya kebijakan *pivot to Asia*, yang berusaha memfokuskan kegiatan politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia, Indonesia juga menggunakan prinsip sejuta teman, tidak ada musuh. Penggunaan prinsip tersebut terhadap kebijakan *pivot to Asia* telah membuat Indonesia dapat melaksanakan tujuannya dalam politik internasional, yaitu dengan secara aktif berperan dalam isu internasional.

Selain itu, tujuan politik luar negeri Indonesia yang berusaha untuk tidak masuk ke dalam sistem yang berlawanan dengan tujuan Indonesia (Haryanto, 2014, pp. 22-3), juga diaplikasikan melalui respon yang dilakukan Indonesia terhadap kebijakan *pivot to Asia*. Hal ini dikarenakan oleh, tujuan dari dilaksanakannya kebijakan *pivot to Asia*

adalah agar terdapat ketaatan terhadap norma hukum internasional, perdagangan, dan kebebasan navigasi.

Lalu, juga terdapat tujuan agar negara *emerging power* dapat meningkatkan kepercayaan dengan negara yang bertetangga dengan mereka, dan supaya cara-cara yang mengancam atau dengan kekerasan dapat dihilangkan, sehingga cara yang damai dapat lebih dipilih dalam penyelesaian suatu permasalahan (Manyin, et al., 2012, p. 1).

Tujuan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari diterapkannya prinsip *a million friends, zero enemy* dan Doktrin Natalegawa yang digunakan pada masa pemerintahan Yudhoyono, yaitu adanya kesempatan bagi negara-negara *emerging power* untuk tetap berkembang secara kondusif (Mendiolaza & Hardjakusumah, 2013).

Hal yang didapatkan dari analisis pengaruh dasar politik luar negeri Indonesia terhadap prinsip *a milion friends, zero enemy* memperlihatkan bahwa dasar yang digunakan oleh Indonesia dalam berpolitik internasional mempengaruhi masa pemerintahan Yudhoyono untuk menggunakan prinsip *a million friends, zero enemy*.

Dapat dilihat bahwa gagasan dan norma-norma yang dimiliki pada dasar politik luar negeri Indonesia juga terdapat pada prinsip yang digunakan pada masa Yudhoyono. Hanya terdapat satu perbedaan mencolok antara keduanya, yaitu mengenai situasi kondisi dunia yang kondusif bagi berkembangnya negara *emerging power* yang terdapat pada Doktrin Natalegawa.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur, dalam hal ini gagasan dan norma dari dasar politik luar negeri Indonesia, mempengaruhi agen, yaitu Yudhoyono secara langsung dalam langkah yang diambilnya, khususnya dalam hal politik luar negeri. Dalam hal ini, langkah yang digunakan oleh Yudhoyono adalah digunakannya prinsip politik luar negeri *a million friends, zero enemy* pada masa pemerintahannya.

Dalam hal bagaimana prinsip tersebut digunakan Yudhoyono dalam merespon kebijakan *pivot to Asia*, dapat dilihat melalui beberapa langkah yang dilakukan pemerintahannya terhadap Amerika Serikat. Pertama, melalui kesepakatan *US-Indonesia Strategic Partnership*. Dengan adanya kesepakatan ini, Yudhoyono menjalin hubungan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat. Apabila pada masa pemerintahan sebelum Yudhoyono, serta ketika kepresidenan Yudhoyono dan Bush bersinggungan, hubungan kedua negara berada dalam kondisi yang kurang baik.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintahan Yudhoyono berusaha untuk memperbaiki sekaligus mencapai titik tertinggi hubungan kedua negara. Hal ini juga merupakan langkah yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *a million friends, zero enemy* serta Doktrin Natalegawa, karena pada prinsip tersebut, dikatakan bahwa Indonesia berusaha untuk bergerak secara leluasa dan berperan aktif dalam isu internasional, serta berusaha untuk tetap berkembang dengan anggapan mengenai kondisi *dynamic equilibrium*.

Selain itu, hal yang melatarbelakangi Indonesia untuk menyepakati kesepakatan tersebut dapat dilihat melalui bagaimana Konstruktivisme memandang konsep kepentingan nasional, yang disebutkan bahwa suatu kepentingan lahir karena sesuatu hal lainnya, tidak datang secara tiba-tiba (Rosyidin, 2015, p. 26). Dalam hal ini, Indonesia memiliki kepentingan untuk membentuk kesepakatan tersebut, karena *US-Indonesia Comprehensive Partnership* melingkupi beberapa sektor yang dapat memajukan perkembangan Indonesia.

Kepentingan yang dijadikan bentuk kesepakatan tersebut juga lahir setelah Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, yang mana politik luar negeri Amerika Serikat di masanya berusaha berfokus terhadap kawasan Asia. Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, mulai dari sisi politik, ekonomi, sampai demokrasi.

Dalam hal ekonomi, Indonesia telah menjadi aktor yang memiliki peran penting, baik itu dalam lingkup kawasan dan global. Karena ekonomi yang kuat dan terus berkembang, juga terdapat pengurangan angka kemiskinan dan hutang. Hal ini dapat dilihat pada PDB Indonesia yang terus meningkat sejak tahun 1998 sampai tahun 2012, serta angka kemiskinan yang berkurang sejak tahun 2006 sampai 2017 (World Bank, 2017).

Dari sisi politik, Indonesia memiliki peranan dalam beberapa forum internasional, seperti ketika menjadi *Chair* dari ASEAN pada tahun

2011, serta ikut berpartisipasi aktif pada G20, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), PBB, serta dinominasikan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2010. Lalu dalam hal demokrasi, Indonesia telah menjalankan peranan yang baik dalam menjadi contoh dalam menjalankan demokrasi untuk beberapa negara, seperti Myanmar, Mesir, dan Tunisia. Indonesia juga mencanangkan untuk dibentuknya *Bali Democracy Forum* (BDF) (Lyng, 2012).

Indonesia juga memiliki kepentingan dalam isu lingkungan dan iklim. Selama jangka waktu tahun 1998 sampai tahun 2011, Indonesia mengalami peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂), dari 1.041 metrik ton per kapita menjadi 2.560 metrik ton per kapita. Tetapi kemudian, terdapat penurunan angka emisi CO₂, sejak tahun 2011 sampai tahun 2014, menjadi 1.819 metrik ton per kapita (World Bank, 2017).

Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian memiliki kepentingan untuk mereduksi emisi CO₂, terbukti dengan berkurangnya emisi yang ada sejak tahun 2011 sampai tahun 2014. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki beberapa komitmen mengenai lingkungan dan iklim dalam tingkat internasional, seperti pada *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United Nations Climate Change Conference* di bawah *United Nations Framework for Climate Change Convention* (UNFCCC), *United Nations Climate Change Convention* (UNCCC), serta Protokol Kyoto (United Nations, n.d.) (UN News, 2007) (Kompas.com, 2010).

Komitmen Indonesia terhadap lingkungan tersebut kemudian dimasukkan dalam kerangka *US-Indonesia Comprehensive Partnership*, yang tercakup dalam kelompok kerja lingkungan dan iklim. Sampai tahun 2013, telah tercapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia mengenai lingkungan, yaitu agar Indonesia berkomitmen terhadap penjagaan kawasan hutan serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Amerika Serikat membantu dengan mentiadakan hutang senilai AS\$ 28.5 juta milik Indonesia terhadap Amerika Serikat. (U.S. Department of State, 2013).

Melihat perkembangan ekonomi, demokrasi dan politik di atas, Indonesia kemudian menawarkan *US-Indonesia Comprehensive Partnership*, yang selain untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara, juga untuk melaksanakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia, yaitu menjamin keberlangsungan perkembangan negara tersebut.

Selain itu, dapat terlihat bahwa komitmen Indonesia sejak dulu terhadap lingkungan dan iklim, melatarbelakangi adanya kelompok kerja mengenai hal tersebut pada *US-Indonesia Comprehensive Partnership*. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Indonesia akan dapat lebih aktif dalam langkah-langkah yang dilakukannya guna menjaga lingkungan serta iklim.

Kedua, Yudhoyono memandang bahwa Obama merupakan salah satu Presiden Amerika Serikat yang pro-Indonesia. Yudhoyono

memiliki pandangan tersebut setelah melihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap terpilihnya Obama sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti berbedanya pandangan masyarakat Indonesia terhadap Bush, yang dianggap sebagai seseorang yang anti-Islam, dengan Obama, yang merupakan anak dari imigran Muslim Afrika.

Identitas Obama yang seperti itu dilihat lebih membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang positif terhadap Amerika Serikat. Selain itu, Obama juga memiliki sikap oposisi terhadap invasi Irak, dan ia juga melihat bahwa permasalahan dunia tidak dapat diselesaikan secara unilateral, melainkan melalui langkah yang multilateral. Hal tersebut, dalam pandangan pemerintah Indonesia, merupakan sesuatu yang dapat menguntungkan Indonesia guna meningkatkan hubungan kedua negara (Murphy, 2010, pp. 326-387).

Meskipun pandangan yang dimiliki Yudhoyono mengenai pemerintahan Obama yang pro-Indonesia serta persepsi positif Indonesia terhadap Amerika Serikat didapati sebelum dicanangkannya kebijakan *pivot to Asia* oleh Amerika Serikat, namun hal tersebut berpengaruh secara langsung terhadap bagaimana hubungan kedua negara dapat berlangsung ke depannya. Salah satu hal yang terpengaruh secara langsung adalah pembentukan kesepakatan *US-Indonesia Strategic Partnership*.

Namun, apabila dipandang melalui perspektif Konstruktivisme, respon terhadap terpilihnya Obama sebagai Presiden Amerika Serikat oleh Yudhoyono tidak hanya dilandaskan pada pandangan positif masyarakat Indonesia dan latar belakang dari Obama itu sendiri. Hal lain yang mempengaruhi respon tersebut adalah latar belakang Yudhoyono yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, sehingga terdapat kedekatan personal dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat.

Kedekatan personal tersebut tidak hanya terdapat ketika Obama mulai menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, tetapi juga sudah ada sejak masa pemerintahan Yudhoyono bersinggungan dengan pemerintahan Bush. Respon yang lebih positif tercipta pada saat Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat dikarenakan adanya persepsi yang demikian oleh publik Indonesia, sehingga seakan-akan terlihat bahwa Yudhoyono hanya berusaha memiliki hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat pada masa Obama, yang di sisi lain merupakan hal yang keliru, karena ketika Bush masih memimpin Amerika Serikat, hubungan kedua sudah mulai diperbaiki oleh Yudhoyono (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2010, pp. 395-398).

Ketiga, Indonesia juga merespon kebijakan *pivot to Asia* melalui hal yang sifatnya multilateral. Berbeda dengan *US-Indonesia Comprehensive Partnership* dan respon terhadap terpilihnya Obama yang sifatnya bilateral, Indonesia memiliki peranan dalam melakukan *engagement* terhadap Amerika Serikat dalam hal multilateral. Langkah

yang dilakukan pada lingkup multilateral adalah dengan adanya dukungan Indonesia terhadap masuknya Amerika Serikat dan Rusia pada *East Asia Summit* (EAS).

Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa dukungan Indonesia terhadap masuknya Amerika Serikat di EAS merupakan bentuk dari usaha Indonesia untuk menyeimbangkan masuknya Tiongkok pada pertemuan multilateral tersebut (Anwar, 2013), tetapi pandangan Konstruktivisme memberikan cara pandang berbeda mengenai masuknya Amerika Serikat di EAS, khususnya dalam melihat bagaimana pemerintahan Yudhoyono hal tersebut.

Hal yang dilihat oleh pandangan Konstruktivisme adalah, gagasan yang dikemukakan oleh Yudhoyono mengenai prinsip politik luar negeri *a million friends, zero enemy*-memberikan pengaruh langsung terhadap langkah yang dilakukan Indonesia dalam usaha untuk memasukkan Amerika Serikat ke dalam EAS. Hal ini didasari pada prinsip *a million friends, zero enemy*, Doktrin Natalegawa dan latar belakang dari Yudhoyono.

Pertama, apabila dilihat melalui prinsip politik luar negeri tersebut, pemerintahan Yudhoyono berusaha untuk memainkan peran yang lebih besar dalam isu internasional, yang dalam hal ini pada EAS. Hal ini merupakan implementasi dari usaha untuk melakukan diplomasi ke seluruh arah, yang di satu sisi Indonesia berperan aktif di EAS, sementara di sisi lain pemerintahan Yudhoyono juga berusaha

melakukan pendekatan terhadap Amerika Serikat untuk bergabung ke dalam pertemuan tersebut.

Hasil dari langkah tersebut adalah, Indonesia tetap memberikan peranan di EAS, sambil melakukan pendekatan terhadap Amerika Serikat. Dengan bergabungnya Amerika Serikat di EAS juga, Indonesia akan memiliki hubungan yang lebih intens dengan Amerika Serikat, sehingga akan lebih mudah bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi dengan Amerika Serikat.

Kedua, menurut Doktrin Natalegawa mengenai ekuilibrium dinamis, dapat terlihat bahwa usaha Indonesia untuk memasukkan Amerika Serikat ke EAS merupakan bentuk dari langkah pemerintahan Yudhoyono untuk melakukan kerja sama jangka panjang atas dasar kepentingan bersama, dengan menggunakan EAS sebagai sarana dari pelaksanaan doktrin tersebut.

Ketiga, kembali melihat latar belakang Yudhoyono yang memiliki hubungan personal dengan Amerika Serikat, dapat dilihat bahwa usaha masuknya Amerika Serikat di EAS merupakan luaran dari kedekatan personal Yudhoyono dengan Amerika Serikat, sehingga hasilnya adalah Indonesia meminta Amerika Serikat untuk turut berperan di dalam forum tersebut.

Keempat, latar belakang Yudhoyono sebagai anggota militer juga turut berpengaruh terhadap respon Indonesia terhadap kebijakan *pivot to Asia*, khususnya dalam hal kerja sama keamanan. Hal ini dapat dilihat

dari dicabutnya larangan kontak antara militer Amerika Serikat terhadap pasukan elit Indonesia, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pada saat Obama memimpin Amerika Serikat. Pencabutan larangan ini kemudian berimbas terhadap normalisasi hubungan antara kedua belah pihak militer negara, sehingga dapat membuka peluang untuk kerja sama antara kedua militer negara tersebut di masa yang akan datang (Murphy, 2010).

Pemerintah Yudhoyono, apabila dilihat dari pandangan Konstruktivisme, mendukung hal tersebut karena Yudhoyono sendiri memiliki karier yang panjang di militer Indonesia. Sejak masuk menjadi Taruna AKABRI pada tahun 1970 sampai kemudian pensiun dari dinas militer pada tahun 1999, Yudhoyono sudah memiliki latar belakang militer yang kuat.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Yudhoyono terhadap kebijakan *pivot to Asia* Amerika Serikat merupakan bentuk dari manifestasi struktur terhadap agen, atau dalam kata lain, bentuk pengaruh dari dasar politik luar negeri Indonesia terhadap Yudhoyono. Luaran dari pengaruh struktur tersebut adalah munculnya gagasan yang dicanangkan oleh Yudhoyono sebagai agen dalam Konstruktivisme mengenai prinsip politik luar negeri, yaitu *a million friends, zero enemy*.

Gagasan prinsip politik luar negeri tersebut kemudian menjadi acuan oleh pemerintahan Yudhoyono dalam menjalankan politik luar

negerinya, yang dalam hal ini, untuk merespon kebijakan *pivot to Asia*. Tidak hanya itu, latar belakang Yudhoyono juga berpengaruh terhadap bagaimana Indonesia merespon kebijakan yang dicanangkan Amerika Serikat tersebut. Sehingga, dalam hal ini, struktur mempengaruhi agen secara langsung dalam pengambilan langkah yang diambil oleh agen tersebut.

3.2. Analisis Pengaruh Struktur terhadap Pembentukan Identitas dan Kepentingan Aktor

Pada bagian ini, akan dianalisis bagaimana struktur gagasan dan ide membentuk identitas suatu aktor, atau bisa juga disebut dengan memahami bagaimana suatu aktor membangun kepentingannya. Kepentingan yang dibangun oleh suatu aktor juga dilihat melalui identitas sosial seseorang, yang dalam hal ini adalah Yudhoyono (Burchill, et al., 2005). Oleh sebab itu, dalam analisis di bagian ini, akan dibahas bagaimana identitas sosial Yudhoyono mempengaruhi kepentingannya sebagai individu dan Presiden Indonesia.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa Yudhoyono memiliki tiga identitas sosial utama, yaitu identitas militer, birokrat serta politisi. Latar belakang militer didapatkan dari perjalanan kariernya di militer Indonesia sejak tahun 1970 di AKABRI, lalu latar belakang birokrat didapatinya dari kariernya sebagai menteri, baik itu di masa pemerintahan Wahid maupun masa pemerintahan Megawati. Lalu, latar belakang politisi merupakan latar belakang yang didapatkan dari keanggotaan Yudhoyono di Partai Demokrat.

Dari latar belakangnya sebagai anggota militer, Yudhoyono memiliki rekam jejak beberapa kali sebagai komandan, panglima, kepala staf, dan posisi strategis lainnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Yudhoyono merupakan pemimpin militer yang berpengalaman baik serta dipercaya oleh pemangku kebijakan di atas Yudhoyono ketika di militer. Kepemimpinan Yudhoyono bahkan sudah mulai diterapkan dari ketika ia masih menjadi Taruna AKABRI, dengan menjadi Dandivkortar hingga ia menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI di tahun 1999.

Kedua, selama ia aktif sebagai anggota militer Indonesia, Yudhoyono juga pernah ditugaskan di luar negeri, yaitu di Yugoslavia, dengan masuk menjadi bagian satuan di PBB, yaitu *United Nations Protection Force* pada tahun 1995. Tidak hanya penugasan di luar negeri, Yudhoyono juga pernah mengenyam pendidikan militer dan non-militer di Amerika Serikat, seperti di Fort Benning, Fort Leavenworth dan Universitas Webster. Dari latar belakang ini, Yudhoyono dapat dilihat sebagai pribadi yang memiliki latar belakang kepemimpinan militer serta pengalaman internasional, utamanya pengalaman pendidikan di Amerika Serikat.

Pendidikan di Amerika Serikat tersebut telah memberikan Yudhoyono pengalaman hidup di negara dengan demokrasi yang baik, berbeda dengan ketika ia berada di Indonesia, yang mana pada saat itu masih di masa pemerintahan Suharto. Di sini, Yudhoyono mendapatkan pengalaman yang tidak dapat dirasakan di Indonesia, yang kala itu masih memiliki tingkat demokrasi yang berbeda dengan Amerika Serikat.

Lalu, Yudhoyono juga secara langsung sudah memahami bagaimana budaya di Amerika Serikat dalam waktu yang tidak sedikit, sehingga hal ini sedikitnya dapat berpengaruh dalam penerapan kebijakannya terhadap Amerika Serikat pada saat ia memimpin Indonesia. Selain itu, dengan memiliki sejarah dengan Amerika Serikat, Yudhoyono memiliki ikatan personal dengan Amerika, sama seperti Obama yang memiliki masa lalu di Indonesia. Ikatan personal ini dapat mempengaruhi bagaimana Yudhoyono kemudian menerapkan kebijakan luar negeri terhadap Amerika Serikat.

Latar belakang sebagai menteri juga memiliki kemiripan dengan latar belakangnya sebagai anggota militer, yaitu kepemimpinan serta kepercayaan atasan atas dirinya. Hal ini dapat dinilai berdasarkan posisi Yudhoyono sebagai menteri yang dijabat sebanyak tiga kali, yaitu dua posisi menteri yang berbeda di masa Wahid, serta satu posisi menteri di masa pemerintahan Megawati. Pengalamannya sebagai menteri selama lima tahun (1999-2004) telah memberikan Yudhoyono dasar-dasar sebagai birokrat di Indonesia, serta memahami secara langsung bagaimana pemerintahan di Indonesia dijalankan. Artinya, Yudhoyono juga telah mengetahui bagaimana kekurangan serta kelebihan dari pemerintahan Wahid dan, utamanya Megawati.

Hal ini tentu diperlukan agar Yudhoyono dapat memberikan perubahan-perubahan dan langkah-langkah yang diperlukan ketika ia mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia, baik itu untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2004, juga guna membentuk kerangka kerja ketika dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Selain mengenai perubahan dan langkah tersebut, pengalamannya sebagai birokrat di

masa Wahid dan Megawati dapat memberikan Yudhoyono diferensiasi terhadap apa yang akan dilakukannya ketika ia menjadi presiden. Hal tersebut yang disebutkan di atas juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap bagaimana Yudhoyono akan merumuskan politik dan kebijakan luar negeri di masa pemerintahannya.

Kemudian, struktur lain yang mempengaruhi identitas sosial Yudhoyono dapat terlihat dari keanggotaannya dalam Partai Demokrat. Nilai-nilai yang terdapat di Partai Demokrat tersebut membentuk identitas sosial Yudhoyono sebagai seseorang yang memiliki berkarakter demokratis, nasionalis-religius, humanis, serta memiliki kepercayaan terhadap internasionalisme. Hal ini kemudian membentuk kepentingan Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia agar kebijakan-kebijakan luar negeri yang dilakukan, khususnya terhadap kebijakan *Pivot to Asia*, dapat berjalan sesuai dengan idealisme yang diautnya.

Penerapan dari kepentingan tersebut kemudian dijalankan melalui ditawarkannya *US-Indonesia Comprehensive Partnership* terhadap Amerika Serikat di masa pemerintahan Yudhoyono guna merespon kebijakan *Pivot to Asia*. Hal ini dapat dilihat melalui poin-poin yang tertera pada perjanjian tersebut, seperti dalam hal HAM dan demokrasi sampai perdagangan dan investasi. Bahkan, penawaran perjanjian tersebut juga merupakan bentuk dari idealisme yang dianut Yudhoyono mengenai internasionalisme, yang mana berupaya membentuk tatanan dunia yang lebih demokratis dan sejahtera.

Selain itu, pemikiran mengenai nasionalis-religius juga memberikan pengaruh terhadap kepentingan Yudhoyono. Hal ini khususnya dapat terlihat

dalam bagaimana Yudhoyono memiliki persepsi positif terhadap terpilihnya Obama pada tahun 2008. Saat itu, masyarakat Indonesia juga memiliki persepsi positif terhadap Amerika Serikat ketika Obama terpilih (Murphy, 2010, pp. 326-387). Hal ini kemudian memberikan Yudhoyono kepentingan untuk turut menyambut hal tersebut sebagai kepentingannya sebagai Presiden Indonesia, dan dalam menjaga popularitasnya di masyarakat.

Lalu, kedua pemimpin negara, Yudhoyono dan Obama, merupakan individu yang berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Demokrat. Hal ini kemudian memberikan Yudhoyono kepentingan untuk menjalin kerja sama yang lebih komprehensif dengan Amerika Serikat—salah satunya melalui *US-Indonesia Comprehensive Partnership*— karena kedua pemerintahan memiliki ideologi yang sama dalam melaksanakan pemerintahan. Kepentingan tersebut juga muncul dikarenakan asumsi bahwa hubungan akan semakin mudah terjalin apabila kedua pemerintahan tersebut memiliki cara pandang yang sama.

3.3. Analisis Hubungan Timbal Balik antara Agen dan Struktur

Pada dalil ketiga teori Konstruktivisme, terdapat penjelasan mengenai hubungan antara agen dan struktur. Disebutkan bahwa struktur dapat membentuk identitas dan kepentingan aktor, tetapi hal tersebut tidak akan ada tanpa adanya langkah aktor yang membentuk struktur tersebut. Penjelasan dari hal ini adalah, langkah yang dilakukan suatu aktor dapat menentukan apakah suatu struktur dapat tetap eksis, atau tidak eksis sama sekali (Burchill, et al., 2005). Pada bagian di atas, dijelaskan bagaimana struktur mempengaruhi agen, atau dalam hal ini, bagaimana dasar politik luar negeri Indonesia mempengaruhi Yudhoyono dalam menciptakan prinsip *a million friends, zero enemy*.

Perbedaan bagian di atas dengan bagian ini adalah, akan dianalisis bagaimana aktor atau agen dapat terus mempertahankan struktur yang ada. Apabila disesuaikan dengan penelitian ini, maka akan dilihat bagaimana Yudhoyono dapat mempertahankan norma dan gagasan politik luar negeri Indonesia.

Cara yang dilakukan oleh Yudhoyono untuk tetap mempertahankan dasar politik luar negeri Indonesia adalah dengan menggunakan prinsip *a million friends, zero enemy*. Menurut analisis di atas, sudah disebutkan bahwa dasar politik luar negeri Indonesia mempengaruhi Yudhoyono dalam menciptakan prinsip *a million friends, zero enemy*. Dalam analisis ini, akan diperlihatkan bagaimana prinsip tersebut lah yang juga turut berperan dalam mempertahankan norma dan gagasan dari dasar politik luar negeri indonesia.

Prinsip *a million friends, zero enemy* lahir dengan anggapan agar Indonesia dapat memposisikan diri di tengah dalam suatu isu internasional. Selain itu, prinsip ini juga digunakan di masa pemerintahan Yudhoyono agar Indonesia dapat melangsungkan diplomasi ke segala sisi. Contoh dari pelaksanaan diplomasi ke segala sisi ini adalah, Indonesia dapat memberikan peranan yang lebih besar di tingkat kawasan, seperti misalnya di Asia Tenggara, tetapi di sisi lain Indonesia juga dapat secara aktif menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain di luar kawasan, seperti misalnya Amerika Serikat. Prinsip ini juga merupakan luaran dari Doktrin Natalegawa, yang menyebutkan bahwa posisi Indonesia berada di posisi ekuilibrium dinamis. Artinya, Indonesia sedang berada pada posisi yang kondusif untuk tetap maju, dengan dasar bahwa negara-negara berkembang sedang semakin tidak memiliki ketergantungan

terhadap negara dengan berkekuatan dominan (Picone & Yusman, 2014) (Mendiolaza & Hardjakusumah, 2013).

Dasar politik luar negeri Indonesia, yang terdiri dari politik luar negeri bebas dan aktif, UUD tahun 1945 dan UU no. 37 tahun 1999 berusaha dipertahankan melalui prinsip *a million friends, zero enemy*. Seperti yang disebutkan pada bagian pertama di atas, terdapat beberapa kesamaan nilai antara kedua bentuk gagasan ini. Pertama, kedua gagasan berusaha agar Indonesia dapat menentukan arahnya sendiri. Menurut prinsip yang digunakan pada masa Yudhoyono, hal ini diaplikasikan melalui anggapan mengenai Indonesia yang dapat berdiplomasi ke segala sisi dan dapat memposisikan diri di tengah. Di lain sisi, pada dasar politik luar negeri Indonesia diterapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menginginkan Indonesia agar dapat bergerak tidak secara apriori, sehingga Indonesia tidak berada pada sistem yang tidak sesuai dengan negara tersebut. Kedua, kesamaan dalam hal agar Indonesia dapat secara aktif melaksanakan politik luar negeri. Pada prinsip *a million friends, zero enemy*, disebutkan bahwa Indonesia dapat memberikan peranan yang lebih besar terhadap isu di kawasan sembari menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara lainnya di luar kawasan. Selain itu, Indonesia juga diharapkan mampu meredam permusuhan, seperti misalnya terhadap kebangkitan Tiongkok dan India di kawasan Asia. Di sisi yang berbeda, dasar politik luar negeri Indonesia menginginkan negara tersebut untuk tetap berperan secara aktif dalam memberikan sumbangan, baik itu secara ide ataupun bentuk partisipasi aktif dalam isu-isu internasional, seperti konflik atau sengketa. Ketiga, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia digunakan untuk kepentingan bangsa. Dalam

prinsip yang digunakan Yudhoyono, dijabarkan melalui Doktrin Natalegawa bahwa kondisi politik internasional pada saat itu berada pada ekuilibrium dinamis, yang memungkinkan negara *emerging power* untuk berkembang dan semakin berkurangnya ketergantungan terhadap negara berkekuatan dominan. Artinya, prinsip *a million friends, zero enemy* memperhatikan bahwa kondisi politik internasional dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang dijelaskan pada UU no. 37 tahun 1999, sebagai bentuk yang erat dengan ketahanan nasional. Artinya, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga harus memperhatikan ketahanan nasional guna menciptakan daya tangkal dan daya tahan, untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan Indonesia agar tujuan nasional dapat tercapai.

Dari ketiga hal tersebut, dapat dilihat bahwa digunakannya prinsip *a million friends, zero enemy* pada masa pemerintahan Yudhoyono mengakibatkan tetap eksisnya dasar-dasar politik luar negeri Indonesia. Dimulai dari poin kebebasan bergerak, keaktifan dalam berpolitik luar negeri, serta mementingkan kelangsungan bangsa. Seperti yang dijelaskan dalam dalil ketiga teori Konstruktivisme, bahwa aktor berperan dalam mempertahankan gagasan dan norma yang terdapat di struktur. Dalam kasus ini, Yudhoyono sebagai aktor di dalam teori Konstruktivisme berperan terhadap pertahanan terhadap struktur yang ada, yaitu dasar politik luar negeri Indonesia, melalui penggunaan dan penerapan prinsip *a million friends, zero enemy*.